KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 3 4 0			H.4 X	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 4 5 5 7 2 6 9 9 7 2 2 0 0 1							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : LILIEK ANI SURYANINGSIH							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						I	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK	PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2 21-402-0	1	5.237.800	5.237.800	0	15	785.670	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 38							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C IDENTITAC DEMOTONO DA IAK							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah	DIMAL DAKET WAS DASSAULATIAN WAS ANALYZAN TIMUB						
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal		2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan	:	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	: Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	i mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	

PTNIK8SQ